BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Aparatur Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menjalankan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mempunyai inisiatif dan empati di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) yang semua itu dilakukan oleh para aparatur Pemerintah khususnya dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah. Jadi selain melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan, aparatur pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dalam segala pelayanan yang menyangkut kepentingan publik.

Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah di daerah, oleh karena itu aparatur Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran. Seiring dengan pencapaian pelayanan publik yang optimal dibutuhkan pula suatu kinerja yang optimal. Kinerja yang

optimal dapat memberikan implikasi yang baik dalam setiap kehidupan baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan politik. Terealisasinya sebuah kinerja birokrasi yang optimal khususnya dalam memberikan pelayanan yang prima dapat memberikan kontribusi besar terhadap rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja belum mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Hal ini terjadi karena seringkali kebijakan yang dibuat kurang memberikan kontribusi kepada kinerja aparatur/pegawai. Rendahnya suatu kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Birokrasi dalam hal ini merupakan aktor utama yang melaksanakan sebuah kinerja. Kita dapat menilai berhasil tidaknya suatu kinerja bergantung kepada birokrasi yang melakukannya.

Sikap dan perilaku birokrat menentukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas maupun tidak. Kendala dan hambatan seringkali ditemui oleh aparatur atau birokrasi dalam proses pelaksanaan kinerjanya baik itu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang kurang menunjang, kebijakan yang kurang tepat, perilaku aparatur yang malas atau kurang bersemangat maupun disebabkan oleh masyarakat yang enggan menuruti aturan yang ada, seperti halnya dalam menyikapi permasalahan sampah.

Sampah merupakan suatu hal yang kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap serta dapat menimbulkan suatu sarang penyakit akibat dari bersarangnya kuman-kuman dan virus. Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya, maka dari itu seiring dengan jumlah penduduk yang besar potensi untuk menghasilkan sampah pun menjadi besar. Problematika sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Salah satu cara untuk meminimalisir bertambahnya volume sampah adalah dengan cara melakukan proses pengelolaan sampah yang maksimal. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Bandung merupakan salah satu Kota di Indonesia dengan volume sampah yang besar. Berdasarkan data dari PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2012, volume timbulan sampah sebagai indikasi kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung periode Tahun 2008-2012, setiap tahunnya menghasilkan rata-rata sebesar 1.369.659 m^3, dengan rata-rata pertambahan sebesar 17,29% setiap tahun atau sebesar 81.394 m^3/tahun, namun demikian volume sampah yang bisa diolah baru sekitar 10%. Data dari PD Kebersihan ini memperlihatkan pula bahwa setiap penduduk berpotensi menghasilkan sampah sekitar 3 liter per hari, sehingga dengan jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2,5 juta jiwa, beban sampah dapat mencapai sekitar 7.500 m_3/hari.

Beban kualitas lingkungan hidup berupa sampah ini memiliki konstribusi terbesar utama berasal dari rumah tangga yaitu sekitar 66% atau 4.952 m3. Kemudian sektor industri merupakan penghasil sampah yang memiliki konstribusi terbesar kedua dengan produksi sampah sekitar 798,50 m^3. Besarnya volume sampah yang dihasilkan di Kota Bandung akibat dari banyaknya jumlah penduduk yang bermukim di Kota Bandung serta banyaknya kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing ke Kota Bandung, mengingat Kota Bandung sebagai kota yang maju dengan sarana dan prasarana yang menunjang seperti sarana pendidikan, kesehatan, tempat bermain, obyek wisata, tempat perbelanjaan yang lengkap, tempat perayaan-perayaan konser musik dan parade band ditambah dengan kuliner yang khas menjadikan suatu ketertarikan bagi masyarakat di Indonesia.

Sarana pendidikan yang lengkap dan berkualitas membuat masyarakat di luar Kota Bandung tertarik untuk menempuh pendidikan di Kota Bandung. Obyek wisata yang beranekaragam menarik wisatawan-wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandung dilengkapi dengan kuliner yang khas dan tempat perbelanjaan khususnya *factory-factory outlet* yang unik menambah perhatian lebih bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandung. Parade band atau konser musik yang sering diselenggarakan di Kota Bandung dengan menghadirkan band-band terkenal atau aktris aktor baik dalam maupun luar negeri membuat masyarakat luar ataupun dalam Kota Bandung tertarik untuk menghadiri.

Hal tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin bermukim di Kota Bandung atau sekedar berkunjung ke Kota Bandung untuk menikmati obyek-obyek wisata dan berbagai hiburan di Kota Bandung, seiring dengan tidak berhentinya aktivitas masyarakat menimbulkan volume sampah bertambah banyak. Sampah-sampah sering terlihat menghiasi ruas-ruas jalan. Peristiwa ini hampir terjadi di seluruh wilayah Kota Bandung. Timbunan sampah yang melebar ke ruas jalan raya seringkali menyebabkan proses transfortasi sedikit terganggu dan mengganggu kenyamanan masyrakat.

Bandung yang merupakan salah satu kota jasa dan mempunyai nilai strategis dalam pariwisata dan pendidikan masyarakat Indonesia diharapkan memberikan kondisi yang nyaman bagi setiap masyarakat dan wisatawan yang berkunjung sesuai dengan slogannya yaitu Bandung Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat), namun pada realitasnya kondisi Bandung pada saat ini tidak seperti yang diharapkan. Permasalahan sampah di Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang bermukim di Kota Bandung tetapi dipengaruhi juga oleh kebiasaan masyarakat dan kinerja dari lembaga yang berwenang dalam proses pengelolaan sampah.

Lembaga yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung. PD. Kebersihan Kota Bandung merupakan badan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebersihan dibidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan, adapun fungsi dari PD. Kebersihan ini adalah perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan usaha jasa kebersihan di bidang persampahan sejalan dengan visi

dan misi Kota Bandung. PD. Kebersihan Kota Bandung dalam mencapai proses pengelolaan sampah yang optimal berpaku kepada beberapa aspek-aspek penting seperti peran serta masyarakat, organisasi/kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan teknik operasional.

Dilihat dari teknik operasionalnya pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pewadahan sampah, kemudian pengumpulan sampah dari sumbernya, penyapuan, dimana proses penyapuan terdiri dari sebagai berikut, penyapu mengambil hasil sapuannya, menempatkan kedalam gerobak (*hand cart*). Gerobak diketemukan dengan kendaraan pengumpul pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, penyapu membawa gerobak ke tempat pemindahan terdekat, kemudian panyapuan di jalan protokol yang sudah ditempatkan tong atau wadah sampah, hasil sapuan dimasukkan kedalam tong atau wadah sampah tersebut.

Pengosongan wadah sampah dapat menggunakan kendaraan pengumpul truk mini/*pick up* dan penyapuan jalan meliputi objek sapuan berupa badan jalan, trotoar dan media jalan. Proses selanjutnya dari pengelolaan sampah adalah proses pemindahan/transfer sampah, proses pengangkutan, proses *Rause, Recycling, Reduce* (3R), proses pengolahan (composting, pemadatan dan pembakaran) dan proses pembuangan sampah ke TPA, namun dalam hal ini tugas dari PD. Kebersihan Kota Bandung hanya meliputi proses penyapuan, proses pemindahan, proses pengangkutan, proses pengolahan dan proses pembuangan akhir.

PD. Kebersihan Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan kota Bandung yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Ruang lingkup kinerja kerja PD. Kebersihan Kota Bandung dalam pengelolaan sampah adalah seluruh Kota Bandung meliputi 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, dan 1.557 RW, dengan pembagian wilayah operasional pelayanan pengelolaan kebersihan, sebagai berikut: Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat, Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara, Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan, dan Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur.

Adapun kendala-kendala yang menghambat proses pengelolaan sampah menjadi kurang optimal adalah berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan sampah terutama mengenai kelembagaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Coblong. Kecamatan Coblong yang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang terletak di bagian utara Bandung, Wilayah Kecamatan Coblong meliputi luas 743,3 Ha dengan jumlah penduduk 101.738 jiwa dan 24.298 Kepala Keluarga, terdiri atas 6 Kelurahan yaitu Dago, Cipaganti, Sadangserang, Lebakgede, Sekeloa dan Lebak Siliwangi serta memiliki 75 RT/RW. Kecamatan Coblong digunakan untuk permukiman penduduk dengan kegiatan ekonomi utama jasa perdagangan dan perkantoran, sehingga menyebabkan banyaknya timbulan sampah yang mengganggu kenyamanan masyrakat.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Coblong meliputi, aspek kelembagaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Aspek kelembagaan disini adalah PD. Kebersihan Kota Bandung, dimana hal yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah adalah kinerja dari pegawai PD. Kebersihan Kota Bandung, kurang optimalnyalnya kinerja pegawai PD. Kebersihan Kota Bandung berdampak kepada aspek lainnya yaitu proses teknik operasional pengelolaan sampah yang kurang optimal dan peran serta masyarakat yang kurang.

Teknik operasional pengelolaan sampah yang menjadi tugas PD. Kebersihan Kota Bandung adalah berhubungan dengan proses penyapuan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Terkait dengan teknik operasional pengelolaan sampah, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja kurang optimal sehingga proses pengelolaan sampah menjadi terganggu adalah berkaitan dengan proses pengangkutan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah sementara. Pengangkutan sampah di Kecamatan Coblong terkadang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan yang seharusnya dilakukan 2 hari sekali, namun pada realitasnya pengangkutan sampah hanya dilakukan dalam waktu 3 sampai 4 hari sekali dan seringkali sampah-sampah tidak tiap hari diangkut. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang menunjang serta jarak tempuh tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang terlalu jauh seperti yang dikatakan oleh salah satu aparatur PD. Kebersihan Kota Bandung.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah truk pengangkut sampah yang kurang memadai. Truk pengangkut sampah yang seharusnya beroperasi sebanyak 106 (seratus enam) unit, namun yang terjadi hanya bisa beroperasi sebanyak 90 (sembilan puluh) unit. Hal tersebut tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap hari di Kecamata Coblong ditambah dengan jarak tempuh yang jauh ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang memakan waktu sekitar 3-4 jam sehingga pengangkutan di Kecamatan Coblong seringkali lamban tidak sesuai dengan jadwal. Hal-hal yang demikian tersebut menyebabkan lambatnya pengangkutan sampah di tempat-tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), sehingga menyebabkan timbulan sampah. Permasalahan selanjutnya adalah mengingat karakteristik Kecamatan Coblong sebagai pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta konservasi yang setiap hari terus terjadi aktivitas sehingga sampah yang dihasilkan terus bertambah banyak dan lebih besar dibanding dengan daerah lainnya, walaupun penyapuan diruas-ruas jalan sepanjang Kecamatan Coblong telah dilakukan namun sampah terus bermunculan.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan gambaran umum yang menghambat kinerja PD. Kebersihan Kota Bandung. Berdasarkan kepada uraian di atas mengenai permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandung, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji lagi secara mendalam mengenai problematika sampah yang terjadi di kota Bandung. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah "**Kinerja Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produktifitas Pengelolaan Sampah PD.Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
2. Untuk mengetahui kualitas layanan Pengelolaan Sampah PD.Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
3. Untuk mengetahui responsivitas Pengelolaan Sampah PD.Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
4. Untuk mengetahui responsibilitas Pengelolaan Sampah PD.Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
5. Untuk mengetahui akuntabilitas Pengelolaan Sampah PD.Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai Kinerja Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan di Kecamatan Coblong Kota Bandung
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah teori-teori yang peneliti gunakan penelitian ini terutama mengenai kinerja aparatur, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi PD.Kebersihan Kota Bandung dalam Pengelolaan Sampah.